

2015

Diskusi Kelompok Masyarakat Sipil di Kupang terkait Sustainable Energy for All Initiative

Laporan Diskusi



Terkait dengan proses Sustainable Energy for All Initiative di Indonesia, IESR melakukan diskusi dengan kelompok masyarakat sipil di beberapa wilayah untuk memberikan informasi mengenai Sustainable Energy for All initiative dan bagaimana kelompok masyarakat sipil di Indonesia dapat berkontribusi di dalam prosesnya, baik dalam proses penyusunan analisis kesenjangan, maupun dalam proses implementasi rencana aksi. Laporan ini memuat hasil diskusi yang dilakukan IESR dengan beberapa kelompok masyarakat sipil di Kupang.



Pengantar

Di tahun 2011, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meluncurkan sebuah inisiatif baru bernama Energi Berkelanjutan untuk Semua (*Sustainable Energy for All*). Inisiatif ini diluncurkan untuk memacu pertumbuhan akses energi bagi semua, yang didukung dengan pengembangan energi terbarukan, serta upaya-upaya untuk melakukan efisiensi energi yang dapat membuka akses bagi masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati akses energi tersebut. Di pertengahan tahun 2012, Indonesia menyatakan dukungannya pada inisiatif ini.

Salah satu hal yang harus dilakukan oleh negara-negara yang mendukung inisiatif ini adalah untuk menyusun RA (Rapid Analysis)/GA (*Gap Assessment*) dimana dari 3 target dunia yang telah dicanangkan, dengan target nasional, atau bahkan target daerah, masing-masing negara dapat mengukur masing-masing. Dalam penyusunan RA/GA ini, PBB menetapkan adanya 3 (tiga) pilar pemangku kepentingan yang harus dilibatkan dalam proses ini :pemerintah, pelaku bisnis, serta kelompok masyarakat sipil.

Institute for Essential Services Reform (IESR) telah mengadakan konsultasi publik dengan kelompok masyarakat sipil pada tahun 2012 yang lalu. IESR juga mengadakan konsultasi publik dengan kelompok masyarakat sipil lain setelahnya, di antaranya di Kalimantan Timur dan Yogyakarta, untuk membangun kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan setempat mengenai isu Energi Berkelanjutan untuk Semua, serta memformulasikan tindakan-tindakan konkrit yang diperlukan untuk mempercepat implementasi dari inisiatif Energi Berkelanjutan untuk Semua di Indonesia.

Pertemuan di Kupang dihadiri oleh sejumlah lembaga, yaitu: **IESR, Pikul, Geng Motor Imut, Koperasi Tapaleuk, cis timor, koalisi perempuan indonesia, perkumpulan masyarakat peduli bencana, care international, child fund, save the children.**

1. The needs for Indonesia under the *Sustainable Energy for All (SE4ALL)*

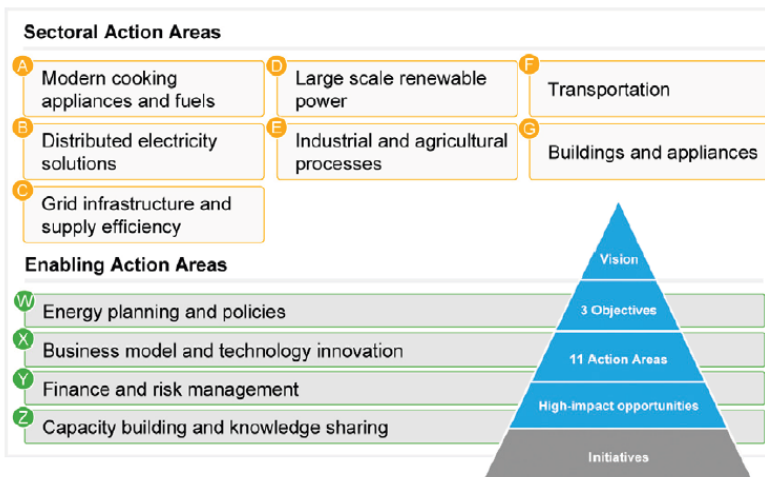
Sustainable Energy for All (SE4ALL) adalah sebuah inisiatif, oleh karena itu sifatnya tidak formal. Artinya, negara-negara yang menyatakan dukungannya terhadap SE4ALL ini tidak perlu meratifikasi inisiatif ini. SE4ALL lahir dari 2 alasan: masih banyak orang yang tidak memiliki akses pada energi di dunia ini, baik itu dalam bentuk listrik maupun bahan bakar untuk memasak yang lebih bersih. Alasan kedua adalah terkait dengan tantangan perubahan iklim. Karena alasan perubahan iklim, maka tantangan untuk kita menyediakan energi menjadi berubah.

Bisa dibayangkan kalau 1,3 miliar populasi di dunia ini menggunakan bahan bakar fosil, bisa dibayangkan dampak perubahan iklimnya. Lebih dari 1.3 miliar orang yang masih bergantung pada bahan bakar padat seperti kayu bakar. Ini juga berkontribusi pada perubahan iklim. Di Afrika banyak hutan ditebangi untuk diambil kayu bakarnya, demikian juga halnya dengan di Indonesia. Kegelisahan ini yang menyebabkan diluncurkan inisiatif ini.



Gambar 1 Tiga target SE4ALL

SEFA ini memiliki 3 tujuan/target, yaitu meningkatkan akses energi secara universal, menggandakan porsi energi terbarukan di bauran energi dan menggandakan efisiensi energi. Saat ini, ada sebuah kesepakatan juga yang disebut dengan Sustainable Development Goal (SDG), yang rencananya akan melanjutkan Millenium Development Goal (MDG). Tiga tujuan dari SE4ALL telah diakomodir di dalam SDG, dalam goalnya yang ke-7.



Gambar 2 Prioritas aksi SE4ALL

Gambar 2 menunjukkan prioritas aksi dari pelaksanaan SE4ALL. Salah satu prioritas aksi yang menarik bagi kota Kupang adalah *distributed electricity solution* (solusi listrik terdistribusi), bukan yang tersentralisasi. Untuk bisa melakukan prioritas aksi tersebut, ada yang disebut sebagai *enabling environment for action* yang artinya perlu ada teknologi, kebijakan, perlu ada model bisnis. Pendanaan dan manajemen resiko; bagaimana menentukan besarnya resiko, contohnya. SE4ALL ini juga merupakan sebuah *platform* untuk berkolaborasi, guna mendukung akses-akses energi dan juga energi terbarukan.

Untuk energi terbarukan, misalnya, jika saat ini kita bilang bahwa PLTU dan bahan bakar fosil itu tidak bisa digunakan, bagaimana kemudian sumber daya tersebut bisa dimanfaatkan dalam skala yang besar untuk memenuhi kebutuhan tadi. Itulah fungsi yang sebenarnya dari platform ini, untuk kita bisa melakukan kolaborasi.

SE4All Country Action Process



Gambar 3 Tahapan-tahapan SE4ALL yang harus dilalui oleh suatu negara

Di tahun 2012, Indonesia telah menyatakan dukungannya terhadap inisiatif ini, melalui surat resmi yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia kepada PBB; menyatakan partisipasinya. Memang perkembangannya semenjak tahun 2013 sampai dengan hari ini, adalah mandek. Ini disebabkan karena Indonesia tidak memiliki forum multi-pihak sebagai *platform*.

IESR menyatakan niatannya agar inisiatif ini bisa terus dilaksanakan di Indonesia. Hal ini juga penting untuk penduduk di wilayah Indonesia timur yang memiliki akses minimum, dimana tantangan kemiskinan yang ada jauh lebih besar, ketimbang tantangan kemiskinan di Pulau Jawa. Jadi, tidak semuaproses harus dilakukan di nasional.

Terdapat 2 tingkat kebijakan untuk meng- intervensi kebijakan, satu di tingkat nasional; dimana IESR saat ini lebih memiliki fokus ke tingkat nasional. Kedua adalah adanya agenda jangka panjang. IESR

bermaksud agar agenda advokasi ini bukan hanya dimiliki oleh LSM di Jakarta, tapi harus dimiliki oleh semuanya. Agenda advokasinya jangan jadi milik NGO di Jakarta aja, tapi harus dimiliki semuanya. Apalagi sekarang era otonomi daerah, eranya desentralisasi. Desentralisasinya nanti turun ke desa. Ini mau didorong sampai ke desa. Desa nanti juga punya otonomi, menurut UU Desa. Ada ruangnya.

Dalam konteks lokal ini penting karena ini kaitannya dengan mitigasi perubahan iklim. Jadi kalau misalnya ada inisiatif lokal yang meningkatkan akses energi yang berbasis energi terbarukan, dapat dipertimbangkan sebagai aksi perubahan iklim. Aspek pendanaan, inovasi, dan seterusnya, dapat juga untuk bisa diterjemahkan ke dalam ini.

Paling tidak ada 3 hal yang ingin didapat dari diskusi ini:

1. Bagaimana gambaran akses energi di Kupang, NTT, paling nggak di Pulau Timor. Apa yang menjadi isu utamanya? Kami selalu melihat bahwa akses energi itu erat kaitannya dengan layanan dasar/pendidikan. Apakah korelasi tersebut terjadi di NTT?

2. Inisiatif-inisiatif apa saja yang ada? Apa yang dilakukan oleh Pemda, atau pemangku kepentingan lainnya untuk menjawab hal terkait dengan akses energi. Apa yang dilakukan? Apa tantangan-tantangannya? Kenapa kok hanya kecil saja, bekerja sama dengan pemda. Padahal, kementerian ESDM tahun lalu dan tahun ini punya dana yang cukup besar untuk tungku hemat energi. Namun, apa yang menyebabkan beberapa rekan di Kupang tidak masuk dalam radar ESDM ketimbang, melainkan tungku yang ditemukan oleh akademisi yang letaknya sangat jauh dari Kupang? Padahal, bisa saja kompornya dibeli di Kupang ketimbang di luar Pulau Jawa, dan Kupang pun sudah bisa membangun kompor-kompor tersebut.

Satu hal lain: Kementerian ESDM itu sebenarnya meminta proposal dari Pemda. Sayangnya, pemda NTT tidak memberikan informasi apa-apa. Padahal, bisa saja jika masyarakat Kupang untuk berkolaborasi dengan pemda dan menyiapkan proposal. Kolaborasi untuk saling memberikan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompo.

3. Kebutuhan apa yang ada? Bukan selalu tentang kebutuhan uang, tapi melakukan scaling-up.

2. Gambaran akses energi di Kupang, NTT

Masalah terkait energi di kelompok masyarakat miskin terjadi pada saat masyarakat tidak bisa mengakses minyak tanah. Untuk mendapatkan minyak tanah, masyarakat harus antri untuk bahan bakar. Maka harus dipikirkan juga apa yang sudah dimulai oleh Geng Motor Imut dan harusnya dikembangkan oleh pemda. Karena teknologinya sudah bisa dibuat di Kupang, maka seharusnya untuk pengadaan barang di daerah Sumba, barangnya tidak perlu diambil dari Pulau Jawa. Tapi lebih baik untuk melihat potensi yang dimiliki oleh NTT, dan bagaimana potensi ini kemudian dapat dikembangkan untuk menolong rakyat di sini.

Terdapat beberapa persoalan yang perlu diselesaikan oleh tim koordinasi, yaitu:

1. Terkait dengan konteks pendataan kemiskinan itu sendiri. Karena data kemiskinan itu hampir sering menjadi persoalan di hampir seluruh Indonesia terkait dengan angka kemiskinan.

2. Terkait dengan bagaimana penanggulangan kemiskinan itu dapat melihat pada akses terhadap perumahan. Sering terjadi ketika di kota itu lahan-lahan semakin sempit untuk membangun sebuah rumah, dan perlu diketahui juga bahwa membangun rumah itu adalah kesulitan untuk masalah energi. Harus dipikirkan bagaimana melistriki rumah-rumah tersebut.

3. Di kota Kupang juga terjadi persoalan tentang kekeringan. Kemarin kami masih berdiskusi tentang bagaimana pembangunan embung masih juga menjadi persoalan, dalam mengatasi masalah kekeringan di kota Kupang. Menurut hasil kajian yang lalu, dikatakan bahwa sumber air kota Kupang agak sulit untuk diperoleh. Ini juga merupakan topik pembahasan di kota mengenai bagaimana masyarakat dapat memperoleh atau merubah air laut menjadi air tawar.

Bicara soal energi memang yang paling dekat adalah perempuan; yang paling terkena dampaknya juga perempuan. Di beberapa tempat, persoalannya adalah minyak tanah, apalagi di pinggiran-pinggiran kota. Kalau perlu kayu bakar, agak sulit untuk diperoleh di kota Kupang, kecuali yang di pinggiran pantai, menggunakan ranting-ranting mangrove untuk dimasak. Pilihan bahan bakar untuk memasak di Kupang adalah dengan menggunakan minyak tanah dan kayu bakar. Memasak dengan menggunakan kayu bakar pun dilakukan dengan menggunakan kayu apa saja, bahkan ranting dan plastik untuk menyalakan api.

Minyak tanah memang sulit dan langka, karena ada kuota, yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Hilir Migas. Harga minyak tanah sendiri di dalam kota mencapai Rp. 4000/L, namun dalam penjualannya, minimum harus membeli 5L per jerigen. Harga 5L di pangkalan bisa mencapai Rp. 20.000, namun di tempat lain bisa berkisar antara Rp. 25.000-30.000. Karena banyaknya orang yang harus mengantri di pangkalan, tidak sedikit juga masyarakat yang membeli di luar pangkalan tersebut, dimana harga minyak tanahnya mencapai Rp. 6000/L.

Solusi yang sebenarnya ditawarkan oleh Geng Motor Imut adalah dengan memperkuat nilai masyarakat, sehingga dapat mengurangi ketergantungan orang dengan energi. Misalnya dengan menggunakan biogas. Walau demikian, banyak orang yang tidak ingin membuat biogas, dikarenakan harga bio-digester dengan ukuran 4m³ memerlukan biaya 20 juta ke atas. Itu sebabnya orang jadi takut untuk investasi di biogas. Padahal, untuk mengurangi ketergantungan tersebut, energi terbarukan sangat diperlukan. Walau demikian, Geng Motor Imut kemudian membuat bio-digester dengan barang-barang yang ada di sekeliling kita, dengan menggunakan drum bekas, contohnya. Keuntungan lainnya dari biogas adalah, selain mendapatkan energi, pengguna juga akan mendapatkan pupuk untuk tanamannya.

Geng Motor Imut memiliki skema pengembangan teknologi sendiri di lab. Sekarang kompor yang dibuat sudah seri ke-8, walaupun kita belum bisa produksi secara massal. Tapi kalau bicara bagaimana dampaknya kepada lingkungan, sudah cukup bagus. Beberapa hari lalu di-tes untuk memasak air sampai 30 L, itu hanya beberapa kayu bakar saja yang habis. Itu artinya energi yang dihasilkan oleh teknologi ini cukup lumayan.

Masyarakat kota Kupang sebenarnya adalah pengguna minyak tanah yang lebih banyak daripada orang desa. Minyak tanah itu hanya untuk umpan api saja. Orang desa itu jarang pakai minyak tanah, karena mereka menggunakan kayu bakar untuk memasak.

Terkait dengan lampu SEHEN. Konsep dari lampu SEHEN memang seperti berlangganan listrik. Jadi, karena itu dianggap milik PLN, kita jadi seperti menyewa. Hanya saja, kalau ada kerusakan, maka akan diganti baterainya.

Terkait dengan akses pada listrik, Kupang setiap hari mengalami pemadaman listrik, namun bergilir di wilayah yang berbeda-beda, sekitar 2-5 jam setiap harinya.

Konsumsi kayu bakar kebanyakan digunakan untuk pakan ternak, dan juga untuk industri tahu tempe, dan buat air panas untuk mandi. Tapi, penggunaan kayu bakar terbesar adalah untuk pakan ternak.

2. Mekanisme pendanaan yang memungkinkan

Walau saat ini sudah ditemukan potensi yang bisa dikelola, tapi dana tetap tidak ada, yang saat ini mungkin untuk dilakukan adalah bekerja sama dengan bank NTT dengan dana CSR. Misalnya perusahaan tahu, tidak perlu mendapatkan seluruh bantuan dana hibah dari CSR, tapi sebagian saja. Misalnya, jika dihitung-hitung yang dibutuhkan untuk investasi adalah 15-20 juta. Maka pabrik tahu tersebut hanya akan mendapatkan 10 juta saja dari dana CSR, sisanya dapat dibayarkan dengan cara kredit. Seharusnya ada inisiatif, ada skala pendanaan. Inisiatif dengan skala kecil ini seharusnya sumber pendanaannya berasal dari CSR.

Masalah saat ini yang juga ada adalah belum adanya business plan yang serius, karena sulit untuk mengerjakan fabrikasi dengan menggunakan tenaga volunteer. Bagaimana caranya untuk mengganti biaya untuk pekerja sepenuh waktu, kecuali dengan pengembangan pasar? Oleh karena itu, harus dikembangkan marketer-marketer profesional, dan pasarnya harus kuat. Masalah distribusi, kesinambungan, fokus pada segalanya, mengerjakan paruh waktu dan dengan basis sukarela.

Perlu juga untuk dijajaki kemungkinan untuk melakukan sinergi dengan program kemiskinan. Apakah program kemiskinan tersebut memiliki komponen energi? Berbeda dengan jaman Millenium Development Goals (MDGs), saat ini Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuan untuk pencapaian 3 tujuan pencapaian inisiatif energi berkelanjutan untuk semua. Oleh karena itu, baik kiranya untuk mencari sinergi antara energi dengan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Di beberapa kementerian yang lain, selain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, juga ada pendanaan-pendanaan yang terkait dengan energi. Itu sebabnya, sinergi adalah penting.

3. Kesimpulan

Melalui pemetaan yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa saat ini untuk NTT dapat berpartisipasi dalam pencapaian Sustainable Energy for All (SE4ALL) adalah:

1. Kolaborasi untuk memperluas pasar produk-produk energi, kolaborasi dengan kelompok yang bergerak di isu perempuan dan energi. Intinya adalah memunculkan demand-nya. Dalam konteks memasak, perlu ditekankan isu *indoor air pollution*, karena memasak dengan tungku yang sangat sederhana. Walau demikian jarang juga bagi perempuan untuk bicara soal teknologi energi-nya. Oleh karena itu, sinerginya memang harus dibangun. Membangun sinergi dan kolaborasi untuk isu pembangunan dan kesehatan, juga perlu untuk dilakukan.

2. Perlu dilakukannya *follow up*. Apa yang dilakukan oleh pemda? Harus memberikan ide kepada pemda tentang apa yang harus dilakukan.

3. Harus berinovasi untuk mendapatkan kebutuhan pendanaan, yang bisa menjembatani permintaan dan pasokan. Misalnya antara bank-bank yang memiliki dana CSR. Memang seharusnya perlu untuk sering berbicara dengan pihak swasta, mengenai bagaimana atau aktivitas apa yang dapat dilakukan melalui dana CSR. Misalnya mau mengembangkan teknologi kompor. Perusahaan-perusahaan seperti ini kalau melakukan CSR, akan melihat dampak sosialnya. Kalau hanya membuat proposal tentang kompor, bagi perusahaan-perusahaan ini kegiatan tersebut sangat kecil. Tapi jika dihubungkan dengan akan mendukung sekian rumah dan bagaimana dampaknya bagi perempuan dan anak-anak, maka besar kemungkinan proposal tersebut akan diluluskan.